

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Acton, Lord, dalam **Krisnawati**, Dani, **Hiariej**, Eddy O.S., **Gunarto**, Marcus Priyo, **Riyanto**, Sigid, dan **Supriyadi** 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Agus** Brotosusilo, 1986, *Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Ali**, Mahrus, 2008, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- , 2013, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Arief**, Barda Nawawi, 2008, *Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Bakhri**, Syaiful, 2010, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta.
- Batubara**, Marwan, **Gie**, Kwik Kian, **Winarta**, Hendra Frans, **Hasan**, M. Fadhil, **Saparini**, Hendri, dan **Aviliani**, 2008, *Skandal BLBI Ramai-Ramai Merampok Uang Negara*, Haekal Media Center, Jakarta.
- Black**, Henry Campbell, (1993), *Black's Law Dictionary*, 3rd Edition, West Publishing Co.
- Darwoto**, 1987, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Wijaya, Surabaya.
- Djaja**, Ermansyah, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Djojohadikusumo**, Sumitro, dalam **Surachmin** dan **Cahaya**, Suhandi, 2010, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farid**, Andi Zainal Abidin, dalam **Hamzah**, Andi, 2008, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Friedman**, Lawrence M., 2001, *American Law an Introduction*, Russell Sage Foundation, New York.
- , 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, (Alih Bahasa : M. Khozim), Nusa Media, Bandung.
- Gie**, Kwik Kian, 2005, *Pemberantsan Korupsi*, Tanpa Penerbit, Jakarta.



- Gultom**, Maidin, 2018, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Refika, Bandung
- Hamzah**, Andi dalam **Prinst**, Darwan, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah**, Andi, 1990, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap**, M. Yahya, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej**, Eddy O.S., 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga. Yogyakarta.
- _____, 2014, *Quo Vadis Pemberantasan Korupsi, Catatan Kritis Untuk Pemerintahan Baru dalam Hukum yang Berkeadilan dan Mensejahterakan : Sumbang Saran Pemikiran untuk Indonesia Baru*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hornby**, Albert Sydney, 1986, *Oxford Advanced Learner's of Current English*, Oxford University Press, Oxford.
- Istanto**, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.
- Kartanegara**, Satochid, 1998, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Marzuki**, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo**, Sudikno, 1985, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno**, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi** dan **Arief**, Barda Nawawi, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi**, **Priyatno**, Dwidja, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenadamedia, Jakarta.
- Muladi** dan **Sulistiyani**, Diah, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate criminal Responsibility)*, PT. Alumni, Bandung.
- Najih**, Mokhammad, 2008, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*, In-Trans Publishing, Malang.
- ND**, Mukti Fajar, dan **Ahmad**, Yulianto, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.



- Poernomo**, Bambang, 1984, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Pramono**, Widyono, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Alumni, Bandung.
- Priyatno**, Dwija, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, CV Utomo, Bandung.
- Radbruch**, Gustav, dalam **Sidharta**, 2009, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo**, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gentha Publising, Yogyakarta.
- Rastuti**, Tuti, 2015, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Refika Aditama, Jakarta.
- Reksodiputro**, Mardjono, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta.
- Sahetapy**, 1994, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung.
- Saleh**, Roeslan, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Salim**, H., 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Schaffmeister**, D., **Keijzer**, N., dan **Sutorius**, E.PH., 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Setiyono**, 2005, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publising, Malang.
- Sjahdeini**, Sutan Remy, 2017, *Ajaran Pidanaan : Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Kencana, Jakarta.
- Sjawie**, Hasbullah F., 2013, *Direksi Perseroan Terbatas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto**, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 1985, *Efektifitas Hukum dan Peran Sanksi*, Remaja Karya, Bandung.

_____, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, dan **Mamudji**, Sri, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soesilo, R., 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Suratman dan **Dillah**, Philips, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung

Wahidin, Samsul, 2017, *Politik Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wojowasito, S., dan **Wasito**, Tito, 1980, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Hasta, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana .
Ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang. LN 1951/90; TLN NO. 155

Undang-Undang Nomor 7 drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak pidana Ekonomi. LN 1955/27; TLN NO. 801

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671



- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).



- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709).
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058).
- Keputusan Jaksa Agung Nomor 518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

C. Putusan Pengadilan



Putusan Mahkamah Agung Nomor.545 K/Pid.Sus/2013, tentang permohonan Kasasi dalam perkara dugaan korupsi yang dilakukan oleh Miranda Swaray Goeltom

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/PID.SUS-TPK/2019, Permohonan Kasasi dalam Perkara Korupsi, dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, Pengujian Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan pembuktian tindak pidana korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Pengujian Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 77 huruf a, dan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana khususnya berkaitan dengan kecukupan alat bukti.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.04/Pid.Sus/2011/PT.Bjm dalam perkara korupsi proses pembangunan Pasar Induk Antasari Kota Banjarmasin yang melibatkan PT. Giri Jaladhi Wana.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 65/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Bdg dalam perkara korupsi penjualan lahan tempat pemakaman umum milik Pemerintah Kota Bekasi yang melibatkan PT. Cakrawala Nusadimensi.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst dalam perkara korupsi proses pemenangan proyek RS Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana serta proyek wisma atlet dan gedung serba guna di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang melibatkan PT Duta Graha Indah.

Putusan PT (Tipikor) Jakarta Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI dalam perkara dugaan korupsi yang dilakukan oleh Syafruddin Arsyad Temenggung.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. dalam perkara dugaan korupsi yang dilakukan oleh Syafruddin Arsyad Temenggung.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY. . Dalam perkara dugaan Korupsi yang dilakukan oleh, Toriq Baya'sut,. mantan Kepala Biro Hukum PT SIER (Persero).

D. Jurnal dan Makalah

Ghfar, Afan, "Hubungan Patron Client dan Kosekuensinya Terhadap Lahimya Pengusaha Indonesia : Review Buku Dr. Yahya Muhaimin," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Nomor 10, Tahun XI, Triwulan IV, 1991.

Hiariej, Eddy O.S., "Asas-Asas Hukum Pidana dan Perkembangannya Dewasa ini", *Proceding Mahupiki Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi*, Yogyakarta, 23–27 Februari 2014.

_____, "United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 1, Februari 2019.

Reksodipoetro, Mardjono, "Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya", *Makalah Seminar Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi*, Yogyakarta, 24-27 Februari 2014.

_____, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 23-24 November 1989.

Sulistiowati, "Dominasi Tanpa Tanggungjawab Induk Perusahaan", *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Universitas Gadjah Mada, 17 November 2015.

Yadav, Vikrant Sopan, "Corporate Criminal Liability : A Camparative Analysis of Judicial Trend", *International Jurnal of Applied Resaarch*, Volume 1, Issue 10, Oktober 2015.

E. Hasil Penelitian

Alim, Hifdizl, **Fachryan**, Fariz, **Susanti**, Laras, **Rohman**, Zaenur, **Madril**, Oce, **Halili**, Hasrul, dan **Mochtar**, Zainal Arifin, 2013, *Pemidanaan Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Laporan Hasil Penelitian, Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ardiono, 2013 "Karakteristik Pertanggungajwaban Pidana Korporasi", *Disertasi Program Studi Dotor Ilmu Hukum*, Univesitas Erlangga Surabaya.

Bustoni, 2020, "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Tindak Pidana Korupsi

Yang Berbasis Nilai Kemanfaatan Dan Keadilan”, Disertasi, Program Pendidikan Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

Mulyati, Nani, “Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana Indonesia” *Disertasi*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Supriyadi dan Hariyanto, 2014, *Kebijakan Legislatif Mengenai Pengaturan Korporasi sebagai Subyek dalam Tindak Pidana*, Laporan Hasil Penelitian, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

F. Surat Kabar/Majalah

Hiariej, Eddy O.S., “Delik Korupsi Dalam RUU Hukum Pidana”, *Kompas*, 24 Februari 2018.

Madril, Oce, “OTT Kepala Daerah”, *Harian Kedaulatan Rakyat*, 31 Desember 2018.

G. Internet

Anonim, “Pengertian Masyarakat Menurut Definisi Para Ahli”, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/10/pengertian-masyarakat-definisi-menurut-ahli.html>, diakses pada 4 Maret 2021.

Ayobandung, “Kerugian Negara Akibat Korupsi Tahun Ini Menurun”, <https://ayobandung.com/read/2015/09/19/3019/kerugian-negara-akibat-korupsi-tahun-ini-menurun>, diakses pada 30 Desember 2015.

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, “Focus Group Discussion Proposal Kegiatan Penelitian Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi”, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/1274>, diakses pada 15 Maret 2021.

Badan Pemeriksa Keuangan, “Proyek Hambalang Rugikan Negara Rp 463,67 Milyar”, <http://www.bpk.go.id/assets/files/magazine/edisi-08-voliii-agustus-2013>, diakses pada 1 Juli 2018.

BBC News Indonesia, “Kasus E-KTP : Setyo Novanto dituntut 16 Tahun Penjara, Denda dan Pencabutan Hak Politik Lima Tahun”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43579739>, diakses pada 9 September 2018.

Beritasatu, “Sejak 2004, Lebih Dari 180 Pihak Swasta Tersandung Korupsi”, <http://www.beritasatu.com/satu/479713-sejak-2004-lebih-dari-180-pihak-swasta-tersandung-korupsi>, diakses pada 12 Agustus 2018.



CNN Indonesia, “Kasus BLBI, Vonis Syafruddin Diperberat Jadi 15 Tahun Penjara”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190104163556-12-358546/kasus-blbi-vonis-syafruddin-diperberat-jadi-15-tahun-penjara>, diakses pada 5 Maret 2019.

Dany, “kasus korupsi proyek hambalang”, <https://www.boombastis.com>, diakses pada tanggal 27 Mei 2021

Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Bahasa Indonesia” www.kamusbahasaIndonesia.org, diakses pada 3 Februari 2016.

Detik.com, “Sihar Tanya Korupsi APBD Sumut ke Ijeck, Ungkit Pihak Ketiga”, <https://news.detik.com/berita/d-4006707>, diakses pada 13 Agustus 2018.

Detikfood, “Alasan Australia Hentikan Pengiriman Sapi ke Indonesia”, <https://food.detik.com/info-halal/d-1660298/alasan-australia-hentikan-pasokan-sapi-ke-indonesia>, diakses pada 11 September 2017.

Elnizar, Normand Edwin, “Kasus-kasus Korporasi yang Dipidana Korupsi di Indonesia”, <https://jurnal.hukumonline.com>, diakses pada 14 Maret 2021.

Ginting, Miko, “Pengamat Dukung KPK Usut BLBI Pakai UU Pidana Korporasi“, <https://indopos.co.id>, diakses pada 7 Maret 2019.

Hakim, Rahmat Nur, “Fakta Putusan Bebas MA terhadap Syarifudin Arsyad Tumenggung”, <https://nasional.kompas.com>, diakses pada 16 September 2020.

Hetharia, Melkias, “Fungsi Hukum Menurut Roscoe Pound”, <https://library.ui.ac.id>, diakses pada 14 Maret 2021.

Hukum Online, “Mau Tahu Biaya Penanganan Perkara Korupsi? Simak Angka dan Masalahnya,” <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 1 Maret 2021.

_____, “Sudah 6 Korporasi Jadi Tersangka Setelah Perma No. 13 Tahun 2016”, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 24 Maret 2021.

Hutomo, Dimas, “Daluwarsa Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58e921c313b7b/daluwarsa-penuntutan-dalam-tindak-pidana-korupsi/>, diakses pada 14 Maret 2019.

Indonesia Corruption Watch, “Trend Pemberantasan Korupsi”, <https://antikorupsi.org>, diakses pada 10 Desember 2015.

Kompas, “Bertambah Dua Tersangka, Ini Daftar Mereka yang Terjerat Kasus e-KTP”, <https://nasional.kompas.com>, diakses pada 5 September 2018.



- Kumparan**, "8 Kekurangan Perma Pidana Korporasi", <https://kumparan.com/kumparannews>, diakses pada 27 Maret 2021.
- _____, "Yusril Nilai Jaksa KPK Tak Bisa Buktikan Korupsi BLBI Eks Kepala BPPN", <https://kumparan.com>, diakses pada 24 Maret 2019.
- Lubis, Uni**, "Peringkat Korupsi Indonesia Membaik, Tapi Tetap Korup", <https://r3.rappler.com>, diakses pada 10 Desember 2015.
- Mahkamah Agung**, "Direktori Putusan", <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 13 Maret 2019
- Media Indonesia**, "Karen Agustiawan Bukan Bebas, Melainkan Lepas", <https://mediaindonesia.com>, diakses pada 24 Maret 2021.
- Movanita**, Ambaranie Nadia Kemala, "Resmi Bebas, Miranda Gelar Ibadah Syukur", <https://nasional.kompas.com>, diakses pada 13 Maret 2019.
- Nugroho**, Bagus Prihantoro, "kasus-e-ktp rp23 t, kerugian-negara, 2-tersangka dan 280 saksi", <https://news.detik.com>, diakses pada tanggal 27 Mei 2021.
- Pujiono**, "Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi", <http://www.pustaka.ut.ac.id>, diakses pada Tanggal 31 Juni 2021
- Puspianto**, Alim, "Konsep Kepemimpinan Ki Hajar Dewantara (Leadership-8)", <https://panduhidayatullah.com>, diakses pada 22 Februari 2021.
- Putra**, Youngky, "Pertanggungjawaban Korupsi Dalam Tindak Pidana Korupsi" http://karyatulisa.blogspot.com/2012/06/12_23.html, diakses pada 24 Maret 2016.
- Romdlon**, Nur, "Ini Jenis Hukuman bagi Koruptor di Berbagai Negara", <https://www.brilio.net>, diakses pada 6 Februari 2019.
- Sari**, Maya Ayu Puspita, "Negara rugi rp 2000 triliun akibat penyelewengan blbi", <https://bisnis.tempo.co>, di akses pada Tanggal 27 Mei 2021.
- Silitongan**, Regina, Krisis Enomi Indonesia Tahun 1998", <https://www.academia.edu>, diakses pada 4 Maret 2019
- Tempo.co**, "Korupsi e-KTP, KPK Periksa 3 Pihak Swasta", <https://nasional.tempo.co>, diakses pada 29 Juni 2018.
- _____, "Kronologi Penangkapan S dan Bos PML dijadikan tersangka", <https://www.tempo.co> diakses pada 8 Maret 2016.
- Tirto**, "Kronologi Kasus Korupsi e-KTP dalam Dakwaan JPU", <https://tirto.id>, diakses pada 13 Agustus 2018.

H. Lain-Lain



Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (Draft Tahun 2019)

Resume Jawaban Kuesioner, Fajar Setiawan, Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Yogyakarta.

Resume Jawaban Kuesioner, Lakso Anindito, Penyidik pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Wawancara dengan Ashari Kurniawan Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 27 Agustus 2020.

Wawancara dengan A. Suryo Hendratmoko, Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tipikor Yogyakarta, tanggal 25 Agustus 2020.